SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KOMPONEN DAN REKENING PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat kelulusan pada
Program Studi Sistem Informasi Jenjang S1 (Strata Satu)
Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer

Oleh :
GIFAR MUHAMMAD IHSAN
1.05.13.159

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
BANDUNG
2017

ABSTRACT

Component and Account Management Information System on Regional Revenue and Expenditure Budget is a system capable of managing components and accounts in conducting an activity and budgeting based on Shopping Analysis Standards or often called SAB, a system capable of communicating between the Regional Device with BPKA on proposal submission process The components can then generate information that can be useful in the process of making a decision based on the results of the management of components and accounts, so that the results of this system can manage any proposed components through several stages until the proposal component is approved and dispatch and become a decision of the mayor.

The use of descriptive methods used with the aim of obtaining detailed information and identification of ongoing system problems, the use of object approach method with UML (Unified Modeling Langeuage) tools in the analysis and design stage, and at the development stage of this system using web engineering Provides a general overview when developers and users about the functionality of the system

The results of this study is able to produce a web-based system and each stage of the proposed components that have been disposting will be the pricing of the Government of Bandung so that the decision mayor.

Keywords : management information systems, components, apbd, government.

I. Pendahuluan

Latar Belakang

Undang – Undang merupakan pedoman dan dasar suatu pemerintahan dalam menjalankan setiap urusan pemerintahannya. Pemerintah Kota Bandung sebagai penyelenggara pemerintahan yang dinyatakan pada Pasal 18 ayat(7) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945 tentang penyelenggara pemerintahan. Sebagaimana telah diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia seperti yang tercantum didalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dalam mengelola urusan – urusan pemerintah daerah tersebut, dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 terkait dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Pengelolaan terhadap usulan komponen dan rekening pada proses pengelolaan anggaran harus mengacu pada analisis standar belanja, sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat 3, Undang - Undang No. 32 Tahun 2004, tentang analisis standar belanja didalam menentukan anggaran.

Sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, merupakan badan pengelola terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, dan sebagai pengelola terhadap setiap usulan komponen dari setiap Perangkat Daerah.

Terdapat dua buah sistem di pemerintah kota Bandung, yaitu Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah yang selanjutnya disebut *e-budgeting*, dan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA).

E-budgeting merupakan sistem yang dikelola oleh Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (BAPPELITBANG), dimana *e-budgeting* ini mengelola seluruh perencanaan dan penganggaran untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan pada setiap urusan yang berada di Pemerintah Kota Bandung.

Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) merupakan sistem penyedia informasi mengenai arus keuangan dalam merealisasikan seluruh program dan kegiatan pada setiap urusan yang berada di Pemerintah Kota Bandung sampai dengan melakukan pelaporan dari setiap arus keuangan tersebut.

E-budgeting dan SIMDA memiliki perilaku yang sama didalam proses pengambilan data, yang didapat dari setiap usulan komponen dari Perangkat Daerah, dimana pada sistem yang berjalan saat ini, pengajuan usulan komponen dari Perangkat Daerah hanya berupa berupa *file excel*. Proses ini harus ditambahkan secara konvensional pada *e-budgeting* ataupun SIMDA, maksud dari konvensional disini adalah setiap penambahan usulan komponen dari Perangkat Daerah harus ditambahkan secara *import* melalui database. Ketika proses pencairan anggaran yang diberikan oleh *e-budgeting* kepada SIMDA masih menerima data anggaran berupa *file excel*, sehingga proses pengambilan data komponen dan rekening masih dilakukan secara konvensial pada proses pencairan anggaran.

Berdasarkan dari hasil penjelasan di atas, maka perlu adanya suatu sistem yang dapat menyalurkan data untuk kedua sistem pada proses pengambilan data komponen dan rekening yang digunakan untuk proses pencairan anggaran. Selain itu, diperlukan juga suatu sistem yang dapat melakukan pengelolaan komponen dan rekening berdasarkan analisis standar belanja serta sistem sebagai penjembatan komunikasi birokrasi antara Perangkat Daerah dan BPKA pada proses pengusulan komponen. Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, maka akan dilakukan penelitian dalam menangani masalah sinkronisasi antara e-

budgeting dan SIMDA. Dengan demikian penelitian diarahkan pada judul "**Sistem Informasi Manajemen Komponen dan Rekening pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Pemerintah Kota Bandung**".

Identifikasi Masalah

Hasil dari penjelasan dari pada latar belakang penelitian, maka didapatlah beberapa identifikasi terkait permasalahan pengelolaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Badan Pengelolaan Keunagan dan Aset di Pemerintah Kota Bandung, dan berikut beberapa masalah yang teridentifikasi diantaranya :

1. Terdapat dua sistem yaitu *e-budgeting* dan SIMDA yang keduanya melakukan proses pengambilan data komponen dan rekening untuk proses pencariran anggaran.
2. Belum terdapat sebuah sistem yang menyalurkan data pada kedua sistem yang melakukan proses pengambilan data antara *e-budgeting* dan SIMDA.
3. Adanya pengajuan usulan komponen dari Perangkat Daerah masih memberikan data usulan komponen yang masih berupa *file excel* beserta surat pengajuan usulan.
4. Konfirmasi atas hasil usulan komponen tersebut diterima atau tidak masih kurang jelas alur kerjanya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah yang diatas, maka permasalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana alur pengambilan data pada sistem e-budgeting dan SIMDA.
2. Bagaimana analisis dan perancangan sistem pada Sistem Informasi Manajemen Komponen dan Rekening pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Pemerintah Kota Bandung.
3. Bagaimana impelementasi dari Sistem Informasi Manajemen Komponen dan Rekening pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Pemerintah Kota Bandung
4. Bagaimana pengujian dari Sistem Informasi Manajemen Komponen dan Rekening pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Pemerintah Kota Bandung.

Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk membangun Sistem Informasi Manajemen Komponen dan Rekening pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Pemerintah Kota Bandung

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, diantaranya :

1. Untuk mengetahui manajemen komponen dan rekening pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sedang berjalan saat ini di Pemerintah Kota Bandung.
2. Untuk mendapat hasil analisis dan perancangan sistem pada Sistem Informasi Manajemen Komponen dan Rekening pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Pemerintah Kota Bandung, dengan menggunakan metode pendekatan *UML(Unified Modeling Language).*
3. Untuk mendapatkan perangkat lunak Sistem Informasi Manajemen Komponen dan Rekening pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Pemerintah Kota Bandung yang berbasis *WEB.*
4. Untuk memperoleh hasil pengujian terhadap Sistem Informasi Manajemen Komponen dan Rekening pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Pemerintah Kota Bandung, dengan menggunakan metode pengujian *black box testing*, dengan teknik equivalence patitioning.

Batasan Masalah

Berfokus pada ruang lingkup penelitian, dan agar tercapainya dari pada tujuan penelitian, maka suatu batasan dibutuhkan untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar pembahasannya tidak terlalu luas. Beberapa batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sistem yang dibangun menjadi media komunikasi antara Perangkat Daerah dan BPKA di Pemerintah Kota Bandung.
2. Sistem yang dibangun merupakan media penyalur data untuk sistem *e-budgeting* dan SIMDA pada proses pengelolaan APBD di Pemerintah Kota Bandung
3. Informasi Pengelolaan komponen dan rekening pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menggunakan analisis standar belanja (ASB).
4. Pengajuan usulan komponen yang harus melalui beberapa tahapan birokrasi yang ada di pemerintahan Kota Bandung, dimana setiap bagian dari Perangkat Daerah akan saling berhubungan dengan setiap bagian dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA).
5. Proses verifikasi, validasi, dan disposisi terhadap usulan komponen yang diajukan oleh Perangkat Daerah.
6. Analisis dan perancangan sistem menggunakan metode pendekatan objek yaitu *UML(Unified Modeling Language).*
7. Implementasi sistem menggunakan *web* aplikasi, dengan bahasa pemrograman *php* dan *framework Laravel*.
8. Pengujian terhadap sistem menggunakan metode *black box testing* dangan teknik *equivalence partitioning*.

II. Kajian Pustaka

Sistem Informasi

Pengertian secara umum dari sistem informasi adalah sekumpulan elemen elemen yang saling terhubung serta memiliki suatu tujuan tertentu, pengertian umum tersebut diambil berdasarkan penggabungan antara konsep dasar sistem dan konsep dasar informasi, dan pada dasarnya suatu sistem informasi ini merupakah suatu alat bantu untuk pengambilan keputusan dengan menggunakan komputer sebagai media pengambil keputusan tersebut. Berikut beberapa teori yang didapat berdasarkan teori teori para ahli agar penjelasan dari sistem informasi ini lebih jelas dan telah dilakukan penelitian sebelumnya :

> Menurut Wilkonson (1992) menyatakan bahwa :
> "Sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengoordinasikan sumber daya (manusia, computer) untuk mengubah masukan (*input)* menjadi keluaran (informasi), guna mencapai sasaran perusahaan." [2]
>
> Berikutya teori yang dikemumakan oleh Celinas, Oram dan Winggins bahwa :
>
> "Sistem Informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis computer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan inforamasi keluaran kepada para pemakai." [2]

Dari beberapa teori yang telah dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan sekumpulan elemen atau lebih yang saling berhubungan atau terkait satu sama lain sehingga menghasilkan suatu informasi yang berguna demi tercapainya suatu tujuan sehingga suatu pekerjaan bisa lebih efektif dan efisien.

Manajemen

Manajemen didefinisikan oleh Nugroho sebagai "suatu tim yang disusun dalam organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh suatu organisasi". [1]

Komponen

Komponen merupakan bagian dari rekening yang terdapat pada anggaran, dimana komponen ini merupakan bagian yang lebih spesifik dari setiap rekening yang ada, suatu komponen bisa memiliki beberapa rekening didalam suatu urusan dalam menjalankan setiap urusan, antara rekening dan komponen ini saling berhubungan. (Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006)

Rekening

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang rekening bahwa yang disebut dengan Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang

daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Penjelasan di atas telah tercantum didalam Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Sistem Informasi Manajemen Komponen dan Rekening pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Sistem Informasi Manajemen Komponen dan Rekening pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu sistem yang mampu mengelola komponen dan rekening didalam melakukan suatu kegiatan, untuk penentuan anggaran berdasarkan analisis standar belanja atau sering disebut ASB, dan sistem yang mampu berkomunikasi antara Perangkat Daerah dengan BPKA pada proses pengajuan usulan komponen, serta dapat menghasilkan informasi yang nantinya bisa berguna dalam proses pengambilan suatu keputusan, dan selain itu, dan berdasarkan hasil pengelolaan komponen dan rekening tersebutlah sistem ini mampu untuk menghubungkan atau mengintegrasikan dua sistem yaitu e-budgeting dan SIMDA.

Laravel

Laravel adalah sebuah *framework* PHP yang dirilis dibawah lisensi MIT, dibangun dengan konsep MVC (*Model View Controller*). Laravel adalah pengembangan *website* berbasis MVP yang ditulis dalam PHP yang dirancang untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan mengurangi biaya pengembangan awal dan biaya pemeliharaan juga untuk meningkatkan pengalaman bekerja dengan aplikasi dengan menyediakan sintaks yang ekspresif, jelas dan menghemat waktu. [2]

III. Objek dan Metode Penelitian

Objek Penelitian

Pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset BPKA Kota Bandung pada Tahun 2010 yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, membawa dampak besar pada pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, karena BPKA merupakan badan daerah yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Bandung sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 329 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 329 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kota Bandung, tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
b. Pelaksanaan tugas teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi anggaran, perbendaharaan, pemberdayaan aset dan akuntansi;
c. Pelaksanaan pelayanan teknis administrative dinas;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Desain Penelitian

Pada awal penelitian, suatu perencanaan pada saat penelitian berlangsung tentunya membutuhkan suatu gambaran secara umum mengenai penelitian, untuk mendapatkan data dan informasi dari penelitian tersebut, dalam hal ini, pemilihan metode yang sesuai dengan menggunakan metode deskriptif, dengan metode ini, setiap permasalahan dan fakta – fakta yang bisa dipelajari dalam bentu pendeskripsian dan gambaran secara umum dari permasalahan yang terjadi pada objek penelitian

Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek, namum data ini merupakan data yang belum diolah sehingga data ini akan digunakan untuk menghasilkan informasi pada akhir penelitian, beberapa teknik pengumpulan data, untuk mendapatkan sumber data primer, berikut diantanya :

1. Wawancara

Teknik wawancara atau *interview* untuk mendapatkan sumber data primer dilakukan secara langsung kepada pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang berada dilingkungan Pemerintah Kota Bandung.

2. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung, bertujuan untuk mengetahui setiap prosedur pada proses pengelolaan anggara dan menganalisis sistem yang sedang berjalan pada saat ini.

Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang didapat secara langsung dari objek atau dari sumber lain diluar objek, dalam hal ini sumber data yang didapat merupakan sumber data yang sudah diolah sebelumnya baik dari objek penelitian atau dari sumber lain, misalkan dari internet atau semacamnya. Sumber data primer ini berfokus pada data yang menjadi acuan pada proses penelitian, yaitu sumber data yang didapat secara langsung dari peraturan perundang – undangan.

Metode Pendekatan Sistem

Metode pendekatan sistem berorientasi digunakan untuk mendefinisikan sistem kedalam masing masing objek atau modul. Setiap objek digambarkan dalam bentuk modul dengan menunjukan hubungan dari masing masing modul dengan modul lainnnya, dan hubungan elemen data dengan elemen kontrol antar hubungan modul.

Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem dimaksudkan untuk memperbaharui sistem yang sedang berjalan dan mengembangkannya dengan sistem yang baru berdasarkan permasalahan yang terjadi pada sistem sebelumnya (yang sedang berjalan), metode pengembangan sistem yang tepat pada penelitian ini adalah dengan metode *web engineering,* karena pada sistem yang akan dikembangkan pada penelitian ini adalah menggunakan *web* aplikasi, karena metode ini memberikan suatu gambaran secara umum ketika pengembang dan user tentang fungsionalitas dari *web* aplikasi tersebut.

Metode *web engineering* memiliki 5 tahapan dalam proses pengembangan sistem, berikut penjelasan tahapan dari metode *web engineering* :

Berikut penjelasan dari tahapan tahapan dari metode *web engineering* :

1. *Customer communication*
   Komunikasi dalam hal ini terutama terkonsentrasi pada 2 hal, analisa bisnis dan perumusan. Analisa bisnis akan mendefinisikan hal-hal apa saja yang akan termuat di dalam *web* aplikasi, misalnya pengguna web yang akan dibangun, perubahan potensial dalam lingkungan bisnis, integrasi antara web yang akan dibangun dengan situasi bisnis perusahaan, maupun database perusahaan. Perumusan adalah pengumpulan informasi tentang hal-hal yang akan dimuat dalam web yang melibatkan semua calon pengguna.
2. *Planning*
   Perencanaan proyek pengembangan aplikasi web kemudian ditentukan, perencanaan akan terdiri dari pendefinisian pekerjaan dan target waktu atas pekerjaan maupun sub pekerjaan yang ditentukan tersebut.
3. *Modeling*
   Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk menjelaskan hal-hal apa saja yang memang diperlukan / dibutuhkan pada aplikasi yang akan dibangun dan solusi yang ditawarkan yang diharapkan dapat menjawab apa yang tersirat dari hasil-hasil analisa dan pengumpulan data.
4. *Construction*
   Pembangunan aplikasi web memadukan antara perkembangan teknologi dengan tools pengembangan web yang telah ada, artinya memilih tools yang efektif namun tetap dapat menyesuaikan dengan teknologi yang berkembang saat ini.
5. *Deployment*
   Aplikasi web diciptakan untuk dapat berguna bagi kebutuhan pekerjaan, dapat dioperasikan oleh *end-user,* dan kemudian dilakukan evaluasi secara berkala, memberi masukan-masukan kepada team pengembang dan apabila diperlukan akan dilakukan modifikasi pada *web* aplikasi tersebut

Penggunaan metode *web engineering* sangat menunjang pada tahap pengembangan sistem aplikasi, karena menyesuaikan dengan ketentuan dan kebutuhan *user*, dan *web* aplikasi ini bisa dengan mudah dipahami oleh *user* (*user friendly)*.

Alat Bantu Analisis dan Perancangan

Alat bantu analisis dan perancangan pada penelitian ini menggunakan alat bantu sesuai dengan metode pendekatan yaitu berorientasi objek, jadi alat bantu yang digunakan adalah *UML(Unified Modeling Languag). UML* ini menganalisis dan menggambarkannya kedalam bentuk diagram, beberapa bentuk diagram pada *UML*

IV. Hasil Penelitian

Tujuan Perancangan Sistem

Tujuan dari perancangan sistem ini adalah untuk memberikan solusi pada sistem yang sedang berjalan sehingga pada sistem yang diusulkan, prosedur dan sistem yang akan berjalan nantinya bisa memudahkan komunikasi antara kedua sistem yaitu *e-budgeting* dan SIMDA, berikut beberapa solusi pada perancangan sistem diantaranya :

1. Setiap usulan komponen dari Perangkat Daerah dilakukan pada sistem dengan konfirmasi penerimaan atau penolakan usulan dilakukan secara *realtime*.
2. Pengelolaan usulan komponen dari Perangkat Daerah melalui beberapa tahapan birokrasi yang berada di pemerintahan (otorisasi akases) yang dilakukan oleh BPKA dan dilakukukannya komunikasi antara Perangkat Daerah dan BPKA
3. Sinkronisasi data dari setiap penambahan komponen dan rekening dan urusan pada setiap program dan kegiatan pada *e-budgeting* dan SIMDA

Perancangan Sistem

Use Case Diagram

Berikut adalah *use case diagram* pada sistem yang diusulkan :
Gambar : **Gambar 4.1**

Activity Diagram

Berikut adalah *activity diagram* pada sistem yang diusulkan :
1. *Activity Diagram* Rekening
   Gambar : **Gambar 4.2**
2. *Activity Diagram* Komponen
   Gambar : **Gambar 4.3**
3. *Activity Diagram* Usulan Komponen
   Gambar : **Gambar 4.4**

Sequence Diagram

Berikut adalah *sequence diagram* pada sistem yang diusulkan :
1. *Sequence Diagram* Rekening
   Gambar : **Gambar 4.5**
2. *Sequence Diagram* Komponen
   Gambar : **Gambar 4.6**
3. *Sequence Diagram* Usulan Komponen

Gambar : **Gambar 4.7**

Perancangan Data

Class Diagram

Berikut adalah *class diagram* pada sistem yang diusulkan :
Gambar : **Gambar 4.8**

Object Diagram

Berikut adalah *object diagram* pada sistem yang diusulkan :
Gambar : **Gambar 4.9**

Deployment Diagram

Berikut adalah *deployment diagram* pada sistem yang diusulkan :
Gambar : **Gambar 4.10**

Component Diagram

Berikut adalah *component diagram* pada sistem yang diusulkan :
Gambar : **Gambar 4.11**

Perancangan Antar Muka

Perancangan Input Login
Gambar : **Gambar 4.12**

Perancangan Input Rekening
Gambar : **Gambar 4.13**

Perancangan Input Usulan Komponen
Gambar : **Gambar 4.14**

V. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat penulis ambil, diantaranya :

1. Sistem yang dirancang adalah sistem informasi manajemen komponen dan rekening pada anggaran pendapatan dan belanja daerah di Pemerintah Kota Bandung. Dalam perancangan ini sistem yang dirancang untuk mengelola setiap komponen dan rekening dan mengelola tahapan pada usulan komponen dari setiap usulan dari Perangkat Daerah.
2. Pengelolaan data pada sistem ini mempunyai menjadi master untuk pembuatan APBD pemerintah Kota Bandung pada proses pengambilan data oleh sistem lain.
3. Pengajuan komponen melalui beberapa tahapan birokrasi pemerintahan oleh masing masing bagian dari Perankgkat Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
4. Setiap tahapan usulan komponen mempunyai catatan posisi untuk usulan komponen tersebut, sampai akhir nya usulan komponen itu di *posting* dan dengan konfirmasi yang jelas apabila terjadi penolakan untuk usulan komponen tersebut

Saran

Penulis sadar bahwa pengembangan sistem informasi manjemen komponen dan rekening dan penelitian ini masih banyak kekurangan, penulis berhadap pada proses pengembangan dari penelitian ini bisa dilengkapi kekurangannya, dan dikembangakan agar lebih maksimal untuk kedepannya, dan berikut beberapa saran yang harus dilengkapi dan dikembangkan selanjutnya, yaitu :

1. Pada tahap pengembangan disarankan untuk menegaskan dalam otorisasi akses pada masing – masing users pengguna sistem, dengan mengikuti birokrasi yang berada pada Pemerintahan Kota Bandung
2. Sinkronisasi data komponen dan rekening dengan sistem lainnya yang berhubungan dengan sistem manajemen komponen dan rekening, agar pada proses yang akan berjalan selanjutnya tidak terjadi penginputan dua kali (*double input*), dan agar sistem bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem yang ada pada pemerintahan.
3. Pemeliharaan dan pengembangan terhadap sistem yang telah dibuat, agar sistem bisa lebih maksimal dalam penggunaanya sehingga sesuai dengan kebutuhan.

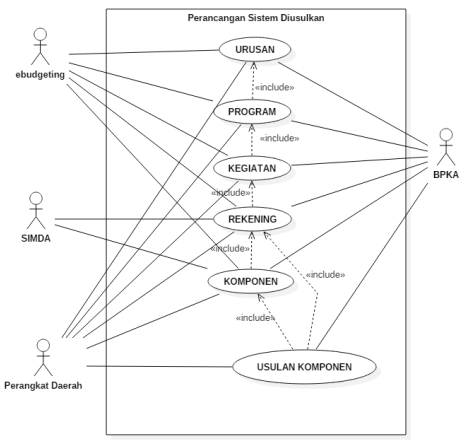
VI. Daftar Pustaka

A. Kadir, Pengenalan Sistem Informasi Edisi Revisi, Yogyakarta: CV. Andi OFFSET, 2014

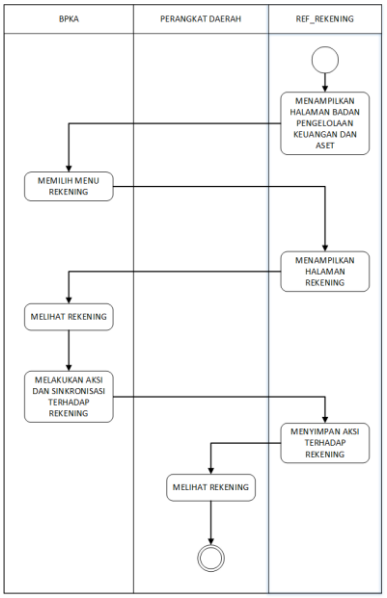
N. D. Lumintang, "Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kota Manado," S. Tr., Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan, Politeknik Negeri Manado, Manado, 2015

W. M. Rizal, "Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran di Pemerintah Kota Bandung," S.Kom., Program Studi Sistem Informasi, UNIKOM, Bandung, 2017.

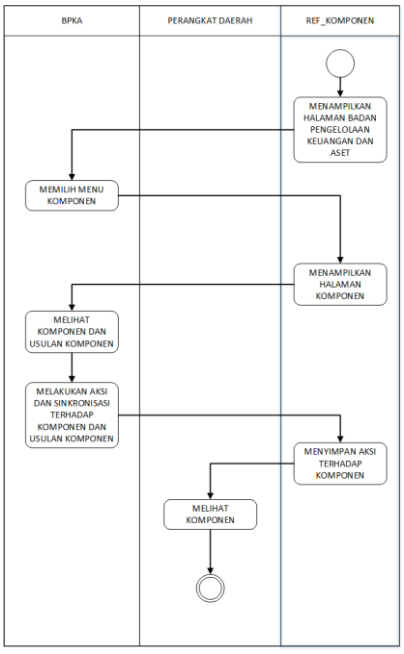
Gambar 4.1. ***Use Case Diagram***



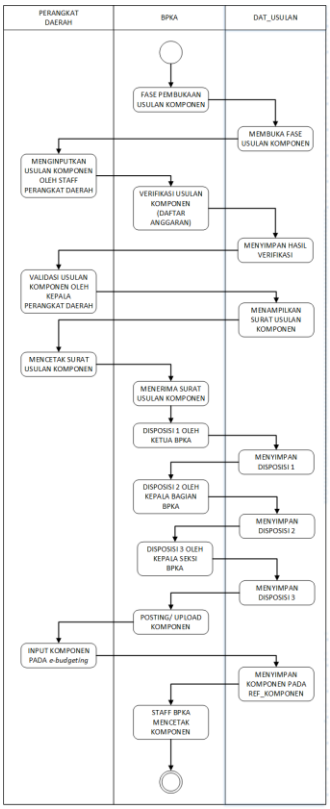
Gambar 4.2. ***Activity Diagram*** **Rekening**



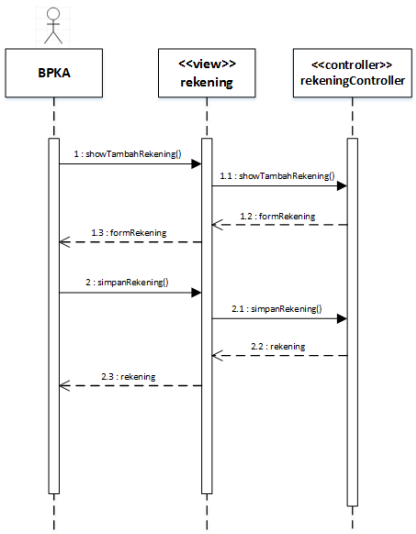
Gambar 4.3. ***Activity Diagram*** **Komponen**



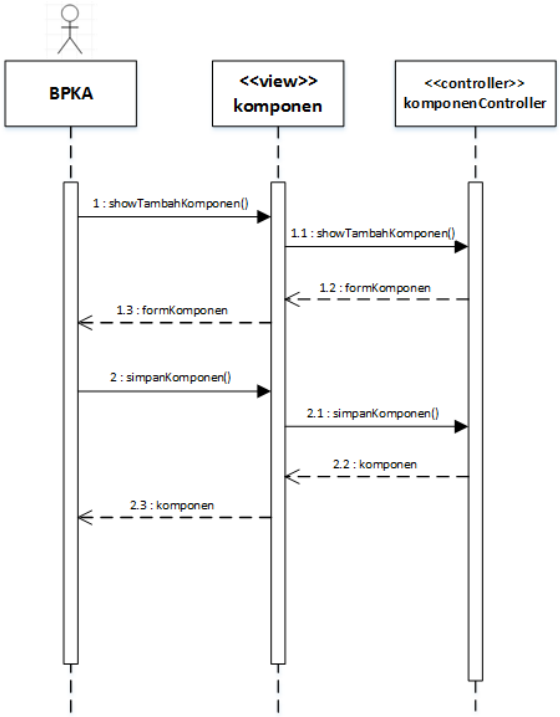
Gambar 4.4. ***Activity Diagram*** **Usulan Komponen**



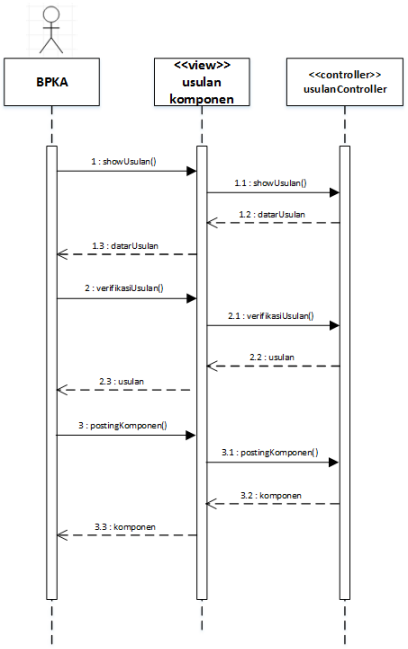
Gambar 4.5. ***Sequence Diagram*** **Rekening**



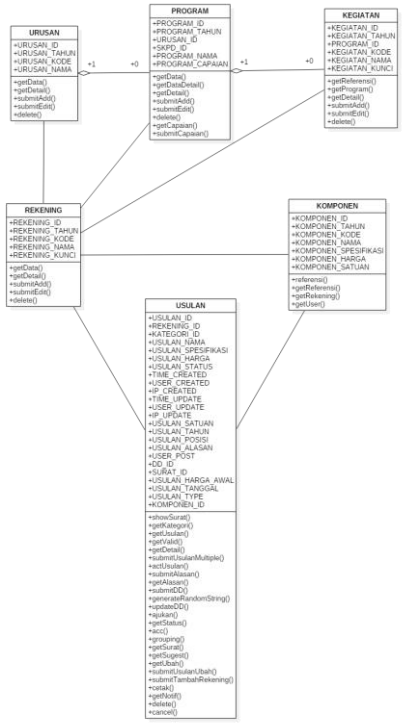
Gambar 4.6. ***Sequence Diagram*** **Komponen**



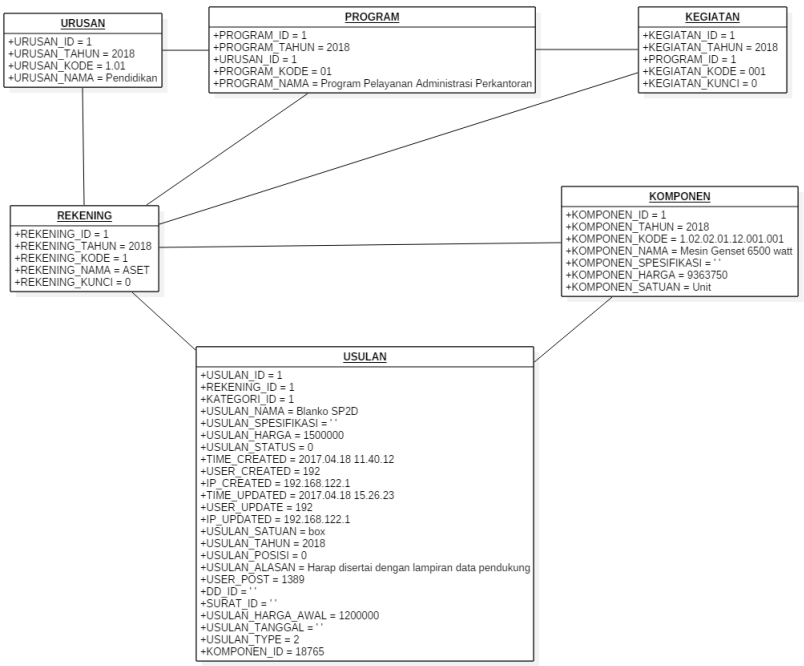
Gambar 4.7. ***Sequence Diagram*** **Usulan Komponen**



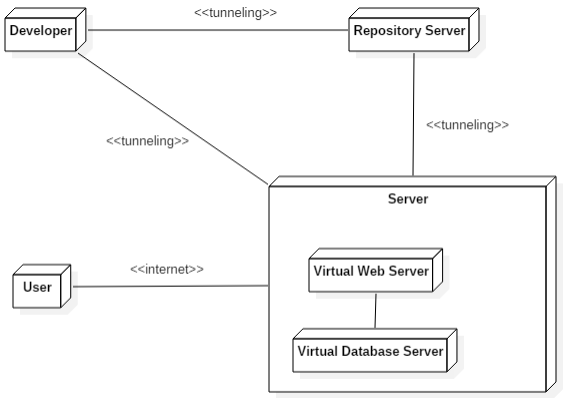
Gambar 4.8. ***Class Diagram***



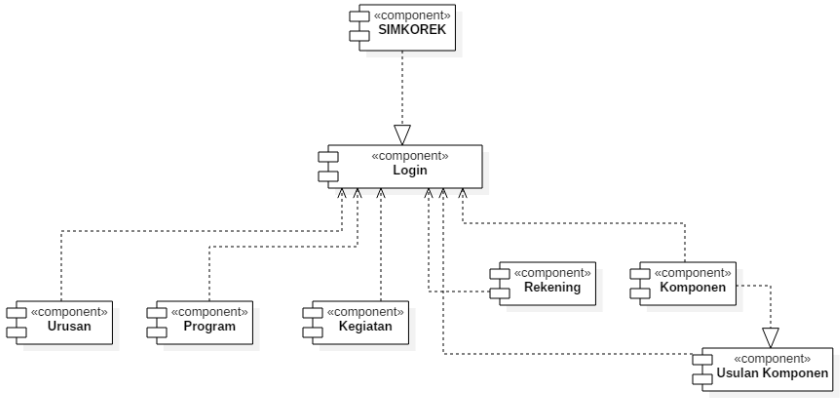
Gambar 4.9. ***Object Diagram***



Gambar 4.10. ***Deployment Diagram***



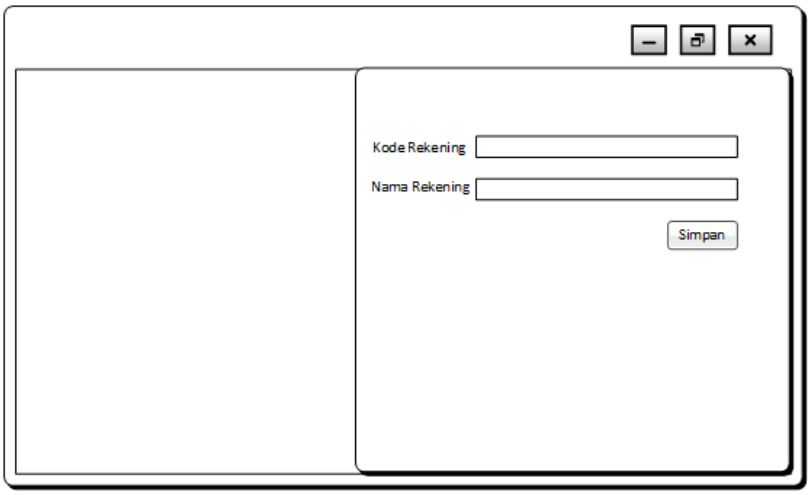
Gambar 4.11. ***Component Diagram***



Gambar 4.12. Perancangan Input Login



Gambar 4.13. Perancangan Input Rekening



Gambar 4.14. Perancangan Input Usulan Komponen

